



**Peran Pemerintah Sebagai Pengambil Keputusan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan**

**Abdul Kadir Ali**

Universitas Nuku

Email: abdkadirali@gmail.com

---

**Info Artikel**

Sejarah Artikel:

Diterima: 30 Desember 2021

Direvisi: 11 Januari 2022

Dipublikasikan: Januari 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.5879435

---

**Abstract:**

*The success of village development is an indicator of community welfare in the village. Meanwhile, development in a village is said to be successful, inseparable from the intervention of all existing elements. The community is seen as an important element in the process of implementing urban development, so community participation is important in its success. The role of the community can be seen in real terms, starting from the involvement of planning (Musrembang) to active participation in its implementation. The main reason for community involvement is none other than the planning carried out must represent the interests and needs of the community, so as to improve the welfare of the community.*

**Keywords:** *decision, participation, role*

---

**PENDAHULUAN**

Keberhasilan Pembangunan Kelurahan merupakan Indikator Kesejahteraan Masyarakat yang ada di Kelurahan tersebut. Sementara itu pembangunan di sebuah kelurahan dikatakan berhasil tidak terlepas dari campurtangan semua unsur yang ada. Masyarakat yang di pandang sebagai unsure penting dalam proses penyelenggaraan pembangunan Kelurahan, sehingga partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam keberhasilannya.

Peran Masyarakat dapat di lihat secaranyata, mulai dari keterlibatan Perencanaan (Musrembang) sampai

pada Partisipasi Aktif dalam pelaksanaannya. Alas an utama dalam keterlibatan masyarakat tak lain adalah, perencanaan yang dilakukan harus mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan Argumentasi diatas Phil Astrid S, Susanto menjelaskan bahwa ; Pembangunan kelurahan ini dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat di bidang kehidupan, baik masyarakat yang bermukim di kelurahan maupun di daerah perkotaan, bukan seluruh

pelosok tanah air. Astrid S, Susanto (1984 :1.).

Pelaksanaan pembangunan itu sendiri pada dasarnya tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata-mata tetapi juga tanggung jawab masyarakat namun dukungan dari masyarakat tidak mudah di peroleh di sebabkan ada kelompok masyarakat yang masing-maig mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda- beda yang pada gilirannya menjadi masalah bagi kepala Kelurahan dalam usaha mengelola pembangunan di daerah kelurahan. Depertemen Dlam Negri (1982 : 6 )

**Tabel 1. Rencana dan realisasi pembangunan kelurahan Bobo Kota TIKEP dalam 4 Thn terakhir.**

No	Tahun Anggaran	Nama program	Sumber Dana	Realisasi	Ket
			Pemerintah Rp	Masyarakat Rp	
1	2007-2008	Pembuatan drainase	50.000.000		100%
2	2008-2009	Pembuatan jalan setapak	45000.000	Ben da	100%
3	2009-2010	Poskeskel	30.000.00	ben da	100%
4	2010-2011	Pembuatan sumur gali.	60.000.000		100%
5	2011-2012	Pembuatan gorong-gorong.	30.000.000		100%

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Peranp

Menurut Hendri Mitzberg dalam Miftah Thoha (2007) bahwa peran bertindak sebagai pemimpin ia melakukan hubungan interpersonal dengan dengan yang di pimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya di antaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan.

Mitzber pun mengemukakan bahwa peran manajer dalah peran menjawab pertanyaan apa yang di lakukan oleh seorang manajer di dalam melakukan kewajiban-kewajibanya. Peran di rumuskan psebagai rangkaian prilaku yang teratur yang di timbulkan karena suatu jabatan tertentu atau adanya suatu kantor yang mudah di kenal.

Untuk merinci lebi lanjut dari peran ini di bagi atas tiga peran menurut Mitzberg antara lain ;

1. Peran sebagai Figurehed, yakni suatu peran yang di lakukan untuk memiliki organisasi yang di pimpinnya di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal. Peran ini sangat mendasar dan sederhana karena otoritas formalnya.
2. Peran sebagai pejabat sementara ( leasion mager ), di sisni manajer atau pimpinan melakukan peran yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang lain yang berada di luar organisasi. Untuk mendapatkan informasi.
3. Peran sebagai pimpinan, dalam hal ini manajer bertindak sebagai pimpinan.

Sohardi Sigit (2003) dalam bukunya” prilaku organisasi “ menerapkan bahwa peran adalah seperangkat pola-pola prilaku yang di harapkan pada seseorang oleh para anggota organisasi. Jika peran itu di defenisikan secara jelas, maka semua

anggota memahami bagaimana semua anggota di harapkan berperilaku

Seorang pemimpin mempunyai dua peran yang tidak boleh di abaikan, yaitu ;

1. Peran tugas. Peran tugas adalah untuk membuat anggota organisasi selalu dalam kebersamaan.
2. Peran pemeliharaan. Peran pemeliharaan juga untuk membuat anggota organisasi selalu berada dalam kebersamaan.

Dengan mengarah pada hal tersebut di atas maka seorang pimpinan dalam mengambil keputusan di harapkan agar memiliki kemampuan yang di kemukakan oleh Henry Praft Firhild sebagai berikut :

1. Bisa memberikan dan mengembangkan motivasi untuk bekerja dan membangun.
2. Mampu menggerakkan orang lain sehingga mereka mau dan rela untuk secara bersama-sama mencari tujuan dengan bekerja.
3. Sanggup mempengaruhi orang lain dan meyakinkan orang sehingga mereka menyadari urgensi pembangunan.
4. Tulus dan iklas dalam melakukan usaha pembangunan itu sendiri melalui perbuatan yang nyata. Hendry Praft Fairhild, (1983; 34).

Bertolak dari uraian di atas maka jelas bahwa apabila seorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang baik besar kemungkinan paertisipasi masyarakat, nantinya yag akan menentukan berhasilnya pelaksanaan pembangunan bahwa sala satu hall yang sangat pentig dalam rangka pelaksanaan pembangunan kelurahan di dalam melibatkan partisipasi dari segenap masyarakat. Ke ikut serta masyarakat dalam proses mulai dari perencanaan sampai pada menikmati hasil-hasil pembangunan.

## **Teori Pengambilan Keputusan**

Masalah pengambilan keputusan merupakan masalah pokok dalam kehidupan manusia dan tak kurang pentingnya bagi kehidupan badan usaha yang sebagaimana tujuannya dan statusnya.

Atmo Sudirdjo mengatakan: “Pengambilan di artikan sebagai suatu pengahiran atau pemuutusan dari pada suatu pemikiran atau problem untuk menjawab pertanyaan atau yang harus di perbuat guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan pilihan pada sala satu alternative tertentu. Pradjudi Atmo Sudirdjo Pradjudi(1974: 54)

Dalam rumusan yang lain S.P.siagian yang mengatakan bahwa” pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternative yang di hadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang tepat”. Siagian (1988:83)

Selain itu M.C Farlan mendefinisikan keputusan: “suatu tindakan pemilihan di mana pimpinan menentukan suatu kesimpulan tentang apa yang harus atau tidak di lakukan dalam situasi tertentu (MC. Farland, Gunung, Jakarta MCMLXXXV).

Menurut rumusan-rumusan di atas maka pengertian itu menunjukan lima hal yang jelas:

1. Dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang terjadi secara kebutulan.
2. pengambilan keputusan tidak dapat di lakukan secara asal asalan karena cara pendekatan kepada pengambilan keputusan harus di dasarkan pada sistematika tertentu:

- a. Kemampuan organisasi dalam arti tersedianya sumber-sumber yang nantinya di gunakan untuk melaksanakan keputusan yang di ambil.
  - b. Tenaga kerja yang tersedia serta kualitasnya.
  - c. Filsafat yang di anut oleh organisasi.
  - d. Situasi lingkungan intern dan ekstern yang akan mempengaruhi jalan administrasi dan manajemen dalam organisasi.
3. Bahwa sebelum suatu masalah dapat di pecahkan dengan baik, hakikatnya dari pada itu harus di ketahui dengan jelas.
  4. Bahwa pemecahan masalah tidak dapat di lakukan melalui ilham atau mengarang akan tetapi harus di dasarkan pada fakta-fakta yang terkumpul secara sistematis terolah dengan baik dan tersimpan dengan teratur sehingga fakta-fakta data itu sungguh dapat di percaya.
5. Bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang di pilih dari berbagai alternative yang ada setelah alternative-alternatif itu di analisa. Siagian (1989 :47)

Namun dalam kenyataan keputusan di ambil oleh seorang pimpinan serig tidak mencerminkan lima unsure yang di kemukakan di atas sehingga menimbulkan masalah atau mengurangi mutu/bobot dari keputusan tersendiri. Oleh karena itu perlu di perhatikan beberapa hal di bawah ini:

1. Pertama-tama kita harus menundukan diri kita sebagai pimpinan, jadi bagi

seorang leader yang mengepalai dan memimpin suatu organisasi.

2. Kita harus menelaah masalah yang kita hadapi.
3. Kita harus melakukan penelaah(termasuk analisa)terdapat situasi yang menjadi “wadah” dari pada masalahnya pula dan terhadap kondisi
4. Setelah kita menelaah leadership yang telah kita jalankan, menelaah masalah yang kita hadapi(identifikasi dan spesifikasi dari pada problem ini harus di lakukan secermat-cermatnya) dann menelaah situasi dan kondisi di mana kita beserta masalah kita berada, maka kita mulai dengan menelaah keputusan yang harus di ambil.

Setelah keputusan yang di ambil, dengan memilih satu dia antara sekian alternative yang ada, maka keputusan akan di perhatikan untuk di laksanakan. (Prayudi Atmasudirjo : 86-72)

### **Partisipasi masyarakat**

Sebagaimana yang di katakana sebelumnya bahwa keberhasilan dalam pembangunan kelurahan sangat di tentukan baik oleh masyarakat itu sendiri, partisipasi masyarakat tersebut sebenarnya merupakan ujung tombak demi untuk meningkatkan pembangunan kelurahan mencakup berbagai ruang lingkup kegiatan yang cukup luas dan kompleks.

Gotong royong dari uraian di atas maka di kemukakan pendapat Dirjen Bangdes pada symposium gotong jakrata pada tgl 18-19 januari 1978, tentang peran serta partisipasi sebagai berikut: “potensi masyarakat dalam bentuk swadaya, gotong royong

merupakan modal utama dalam potensi yang esensial dalam melaksanakan pembangunan kelurahan yang selanjutnya tumbuh yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat kelurahan dalam suatu Negara. Tidak saja pengambilan kebijakan tinggi perencanaan, pimpinan pelaksanaan operasional tetapi juga petani. yang tradisional, nelayan, buruh pedagang kecil dan lain-lain Bintoro Tjokromidjojo (1983 : 222)

Berarti bahwa keberhasilan penyelenggaraan menurut adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk fisik akan tetapi lebih baik lagi apabila partisipasi tersebut berbentuk aktif. Partisipasi masyarakat yang berbentuk pasif dapat berarti bahwa di dalam sikap, dan tindakan masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dapat menghalangi kelancaran kegiatan pembangunan secara nasional, sedangkan partisipasi yang berbentuk seperti turut memikirkan bagaimana mengarahkan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan.

Partisipasi yang demikian kewajiban dari setiap warga Negara seperti menyumbangkan sesuatu terhadap kegiatan pembangunan secara jujur dan sekaligus sebagai pengorbanan sebagai upaya demi kepentingan pembangunan nasional di masa yang akan datang.

Menurut Davis, partisipasi dalam pembangunan seharusnya merupakan peristiwa psikologis. Di mana masyarakat yang di komunikasikan di harapkan agar dapat :

1. Mengamati ( menyadari berbagai jenis informasi yang tersedia untuk di tafsirkan
2. Memusatkan perhatian(memilih)
3. Menafsirkan (menilai, menentukan makna ).

4. Memahami (meneliti pertalian makna dengan hal-hal lain). Ibid (125).

Memahami kegiatan-kegiatan yang demikian maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kelurahan dalam menyongsong era globalisasi sekarang ini. Pembangunan pada hakikatnya adalah mengharuskan suatu kerja keras secara terus menerus menerima demi tercapainya sasaran pembangunan yang telah di gariskan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dan data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengutip dan mengulas berbagai teori, data sekunder dan informasi yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen. Data tersebut kemudian diolah menjadi landasan teoritik untuk penyusunan konsep penelitian dan pembahasan serta penggambaran obyek dan subyek penelitian. Studi Kepustakaan dilaksanakan dengan membaca, membahas dan menyerap isi sejumlah buku, dokumen, dan referensi yang dianggap dapat mendukung konsep penelitian.

#### **2. Kuesioner**

Teknik kuesioner adalah metode pengumpulan data primer yang diajukan kepada para responden yang menjadi sampel penelitian. Teknik kuesioner diajukan untuk menggali masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Kuesioner Penelitian yang berfungsi sebagai alat pengumpul

data primer dari sejumlah responden yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner Penelitian terdiri 8 item pernyataan. Pengajuan pernyataan-pertanyaan disertai dengan pilihan jawaban disusun berdasarkan skala Likert. Mengenai Skala Likert, Supranto (1997 : 86) menjelaskan :

R.A. Likert (1932) mengembangkan prosedur penskalaan dimana skala mewakili suatu kontinum bipolar. Pada ujung sebelah kiri (dengan angka rendah) menggambarkan suatu jawaban yang negatif sedangkan ujung kanan (dengan angka besar) menggambarkan yang positif.

Selain pernyataan-pernyataan untuk menggali masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian, penyusunan kuesioner penelitian juga disertai dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai karakteristik responden penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud dijadikan instrumen untuk mengungkap karakteristik para responden yang menjadi sumber data penelitian. Kuesioner penelitian diberikan kepada para responden yang menjadi sampel penelitian. Sampel penelitian sebanyak 75 orang diambil dari populasi unsure pemerintah kelurahan sebanyak 7 dan unsure masyarakat sebanyak 68 orang yang terdiri atas tokoh adat sebanyak 16 orang, tokoh agama sebanyak 16 orang, tokoh masyarakat sebanyak 18 orang dan tokoh pemudah sebanyak 18 orang pula.

### 3. *Observasi*

Observasi (pengamatan langsung) dilaksanakan di Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat serta lokasi-lokasi kegiatan pembangunan. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi dinamis obyek penelitian serta berbagai hal yang terkait dan atau dapat mengungkapkan situasi dan kondisi

masalah yang dijadikan obyek penelitian. Observasi dilakukan bersamaan dengan penyampaian Kuesioner Penelitian kepada para responden penelitian.

### 4. *Wawancara*

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya Jawab langsung dengan *key informan* yang dipandang mengetahui permasalahan penelitian, Cara di gunakan untuk mewawancarai responden menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat tertutup yang telah di siapkan alternative jawabannya, sehingga responden memilih sala satu alternative jawaban sesuai dengan keinginannya.

Dalam rangka wawancara ini, penulis telah menetapkan *key informan* sebagai responden Dengan jumlah keseluruhan 75 orang.

### **Teknik analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan untuk mendapatkan data-data empiris di lapangan adalah deskriptif kualitatif dengan bantuan tabel frekuensi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Data.**

Pada bagian ini akan di sajikan analisa data yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan sebagaimana yang telah di uraikan pada bagian terdahulu bahwa analisa data-data hasil penelitian akan di lakukan secara diskriptif kualitatif yang di bantu dengan table frekuensi di mana data empiris yang di peroleh lewat hasil pengisian kuisisioner dari sebuah responden untuk memberikan data kualitatif terhadap fariabel dalam penelitian ini akan di diskripsikn secara realitas dan di hubungkan dengan kualitas-kualitas partisipasi masyarakat secara realitas dari implementasi peran pemerintah sebagai pengambil keputusan dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat di kelurahan Bobo kecamatan Tidore Utara.

Sebagaimana terkait dengan ke dua variabel yaitu variable bebas dan variable terikat dengan masing –masing indicator sebagai berikut: .

Variabel Bebas “Peran Pemerintah sebagai pengambil keputusan” (X)

- a. Adanya rapat antara masyarakat dengan aparat kelurahan.
- b. Keikutsertaan masyarakat secara keseluruhan tentang keputusan-keputusan di kelurahan.
- c. Tersalurnya aspirasi masyarakat dalam keputusan-keputusan di kelurahan.
- d. Pengambilan keputusan secara musyawara dalam rapat bersama-sama aparat kelurahan.

Ada pun jawaban responden terhadap ke empat variable di atas dapat terlihat pada tabel berikut.

**Table 9. Jawaban responden atas pertanyaan variable X**

No	Indicator	Frekuensi	%	Keterangan
1	Rapat antara masyarakat dan aparat kelurahan			
	a. sudah melaksanakan	26	34,6	
	b. kurang melaksanakan	26	34,6	
	c. tidak melaksanakan	23	30,8	
2	ikut serta dalam berkeputusan	26	34,6	
	a. Sudah ikut serta dalam berkeputusan	49	65,3	N=75
	b. Kurang ikut serta	-		
	c. Tidak ikut serta dalam keputusan			

3	Tersalurnya aspirasi masyarakat.	39	52
	a. Sudah tersalur aspirasi	36	48
	b. Kurang tersalurnya aspirasi	-	
	c. Tidak tersalurnya aspirasi		
4	Musyawara dalam pengambilan keputusan.		
	a. Sudah melaksanakan	20	30
	b. Kurang melaksanakan	41	54,6
	c. Tidak melaksanakan	14	15,4

*Sumber Data ; hasil Pengolahan Data Primer*

Dari tabel di atas di jelaskan bahwa bagi responden yang menjawab sudah melaksanakan yaitu sebanyak 26 orang responden (34,6 %), yang menyatakan kurang melaksanakan 26 orang responden (34,6 %) dan yang menyatakan tidak melaksanakan 23 responden (30,8 %), Selanjutnya dari 75 orang responden yang menjawab dalam pertanyaan ke dua adalah 26 orang ressponden (34,6 %) menjawab sudah ikut serta dalam berkeputusan, dan yang menyatakan kurang ikutsrta dalam berkeputusan sebanyak 49 orang responden(65,3 %).

Dari petanyaan ke tiga yang menjawab sudah tersalurnya aspirasi 39 orang responden (52 %) dan 36 orang responden (48 % ) menjawab kurang tersalurnya aspirasi. Kemudian pertanyaan yang keempat 20 orang responden (30 %) menjawab sudah melaksanakan musyawara dalam berkeputusan , dan 41 orang responden (54,6 %) menjawab kurang melaksanakan musywara , dan 15 orang responden (15,4 % ) menjawab tidak melaksanakan musywara.

2. variable terikat (meningkatkan partisipasi masyarakat kelurahan Bobo )

Dengan indicator :

- a. Ikut serta dalam menyumbangkan tenaga dalam pembangunan kelurahan.
- b. Ikut serta dalam menyumbangkan pemikiran dalam pembangunan kelurahan.
- c. Ikut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan.
- d. Ikut serta dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.

Adapun jawaban reponden terhadap ke empat variabel di atas dapat terlihat pada tabel berikut :

**Table 10. Jawaban responden atas pertanyaan variable (Y)**

N	indikator	frekuensi	%	keterangan
1	Menyumbangkan tenaga.	53	70	
	a. Sudah	22	,6	
	menyumbangkan	-	29	
	ngkan	-	,3	

	b. Kurang menyumbangkan			N=75
	c. Tidak menyumbangkan			
2	Menyumbangkan pemikiran	32	42,6	
	a. Sudah menyumbangkan	38	50,6	
	ngkan	5	6,6	
	b. Kurang menyumbangkan			
	c. Tidak menyumbangkan			
3	Mengawasi jalannya pembangunan.	41	54,6	
	a. Sudah melaksanakan	34	45,3	

	akan		
	b. Kurang melaksanakan akan		
	c. Tidak melaksanakan akan		
<b>4</b>	Memelihara hasil-hasil pembangunan.	37	49,3
	a. Sudah melaksanakan akan	-	50,6
	b. Kurang melaksanakan akan		
	c. Tidak melaksanakan akan.		

*Sumber Data ; hasil Pengolahan Data Primer*

Dari tabel di atas di jelaskan bahwa bagi responden yang menjawab pertanyaan variabel terikat (Y), sudah menyumbangkan yaitu sebanyak 53 orang responden (70,6 % ), yang menyatakan kurang menyumbangkan 22 orang responden (29,3 % ). Selanjutnya dari 75 orang responden yang menjawab dalam pertanyaan ke

dua adalah 32 orang responden (42,6 % ) menjawab sudah menyumbangkan dan yang menyatakan kurang menyumbangkan sebanyak 38 orang responden (50,6 %), dan 5 orang responden (6,6 %) menjawab tidak menyumbangkan.

Dari pertanyaan ke tiga terlihat yang menjawab sudah melaksanakan sebanyak 41 orang responden (54,6%), dan 34 orang (45,3 %) menjawab kurang melaksanakan. Kemudian pertanyaan ke empat 37 orang responden (49,3 %) menjawab sudah melaksanakan , dan 38 orang responden (50,6%) kurang melaksanakan.

### **KESIMPULAN**

Sebagaimana telah di uraikan terdahulu bahwa penelitian ini bertujuan untuk menghimpun, mengelola, menganalisa bagaimana peran pemerintah Kelurahan sebagai pengambil keputusan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kelurahan Bobo kecamatan tidore utara kota tidore kepulauan.

Analisa data-data hasil ini di lakukan secara diskriptif kualitatif, di bantu dengan table frekuensi di mana data yang di peroleh di diskriptifkan secara realitas dari implementasi peranan lembaga pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kelurahan Bobo. Berdasarkan dari beberapa indikator yang telah di uraikan dapat di ketahui sejauh mana peran pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kelurahan Bobo.

Berdasarkan indicator pada variabel bebas “ peran pemerintah sebagai pengambil keputusan “. Maka dapat saya simpulkan, peran pemerintah sebagai pengambil keputusan belum secara efektif sehingga mengakibatkan

kurang maksimalnya partisipasi masyarakat di kelurahan Bobo.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bintoro Tjikoro Amidjodjo, 1983, Pengantar administrasi pembangunan, LP3S, Jakarta.
- Koecaningrat, 1980, metodeologi pembangunan.
- Pemerintah daerah Maluku utara, 1992, pedoman teknis penyelenggaraan pemerintah kelurahan bagi kepala kelurahan.
- Pemerintah kelurahan bagi kepala kelurahan.
- Prayudi Admosudirjo, 1979, beberapa pandang umum tentang pengambilan keputusan, Jakarta.
- Phil Astrid S. susanto, sosiologi pembangunan, Bina Cipta , Jakarta.
- Soewarno Handyaningrat, 1986, pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen, gunung agung Jakarta.
- Sp Siagian, administrasi pembangunan, CV Haji Masagung.
- Sp Siagian, 1988, system informasi untuk pengambilan keputusan. CV Haji Masagung Jakarta.
- Sp Siagian, 1993, teori dan praktek pengambilan keputusan, CV Haji Masagung Jakarta.
- Sp Siagian, 1989, filsafat administrasi, gunung agung, Jakarta.
- Talidziduhu ndraha, 1987, metodologi pembangunan.